



Research article

Analisis Pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Kabupaten Indragiri Hilir

Analysis of Social Security Administration Agency (BPJS) Health Users in Indragiri Hilir Regency

Rizki¹, Ridho², Kawet Mujiono³, Achmad Isya Alfassa⁴

^{1,2,3,4}Sistem Informasi, Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, Indonesia

email: ¹rizkirizki3941@gmail.com, ²ridhomdta@gmail.com, ³kawetmujiono72@gmail.com, ⁴achmadisyaalfassa@gmail.com

* Korespondensi

ARTICLE INFO

Article history:

Received mm dd, yyyy

Revised mm dd, yyyy

Accepted mm dd, yyyy

Available online mm dd, yyyy

Keywords:

BPJS Kesehatan,
Indragiri Hilir,
Kepesertaan,
akses Layanan,
Ketimpangan Geografis

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola penggunaan layanan BPJS Kesehatan oleh masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Sebagai daerah dengan kondisi geografis yang cukup kompleks dan beragam, Indragiri Hilir menghadapi tantangan dalam pemerataan akses layanan kesehatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi kesehatan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi BPJS Kesehatan di beberapa kecamatan, seperti Tembilahan, Keritang, dan Kateman relatif tinggi. Namun, masih ada ketimpangan yang signifikan di daerah pesisir dan terpencil seperti Sungai Batang, Teluk Belengkong, dan Pulau Burung. Selain faktor geografis, rendahnya literasi kesehatan dan akses informasi juga menjadi penyebab utama. Juga ditemukan bahwa ada perbedaan dalam data keanggotaan yang mengindikasikan perlunya pembaruan dan verifikasi data secara berkala. Studi ini merekomendasikan perlunya strategi yang lebih inklusif dan adaptif, terutama dalam menjangkau daerah yang sulit dijangkau, untuk mencapai akses pelayanan kesehatan yang merata bagi semua masyarakat.

This study aims to analyze the patterns of BPJS Health service utilization by the community in Indragiri Hilir Regency, Riau Province. As an area with a relatively complex and diverse geographical conditions, Indragiri Hilir faces challenges in equitable access to health services. The method used in this research is quantitative descriptive, with secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and related health institutions. The results show that the participation rate of BPJS Health in several sub-districts, such as Tembilahan, Keritang, and Kateman, is relatively high. However, significant disparities still exist in coastal and remote areas such as Sungai Batang, Teluk Belengkong, and Pulau Burung. In addition to geographical factors, low health literacy and limited access to information are also the main causes. It was also found that there are discrepancies in membership data, indicating the need for regular data updates and verification. This study recommends the need for more inclusive and adaptive strategies, especially in reaching remote areas, to achieve equitable access to health services for all people.

1. Pendahuluan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional bagi seluruh penduduk Indonesia. Program ini diharapkan dapat memberikan akses layanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Namun, dalam pelaksanaannya, pelaksanaan program BPJS Kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di daerah luar Jawa seperti Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Permasalahan yang sering muncul antara lain ketidaksesuaian antara jumlah peserta dan tingkat pemanfaatan layanan, keterbatasan fasilitas kesehatan, dan rendahnya literasi kesehatan masyarakat.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (UU No. 24 Tahun 2011). BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan merupakan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta mendapatkan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah.

Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten di wilayah pesisir Riau yang memiliki karakteristik geografis yang unik dan menyulitkan akses layanan kesehatan. Kondisi ini menjadi tantangan dalam mengoptimalkan program BPJS Kesehatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan setempat, meski tingkat kepesertaan BPJS cukup tinggi, namun belum diimbangi dengan efektivitas pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh masyarakat³. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam tentang pola penggunaan BPJS Kesehatan oleh masyarakat di daerah ini.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengetahui bagaimana perilaku, motivasi, dan kendala yang dihadapi masyarakat dalam menggunakan layanan BPJS Kesehatan. Hal ini sangat relevan mengingat BPJS merupakan salah satu pilar utama dalam sistem jaminan sosial nasional. Minimnya penelitian berbasis daerah, khususnya di Indragiri Hilir, juga memperkuat pentingnya penelitian ini dilakukan. Dengan memahami kondisi riil di lapangan, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan BPJS di daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pola penggunaan layanan BPJS Kesehatan oleh masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan, dan merumuskan solusi atau rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program. Rencana pemecahan masalah dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan teknik survei, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi data BPJS dan instansi kesehatan terkait. Dengan pendekatan ini, diharapkan akan diperoleh gambaran komprehensif yang dapat dijadikan pijakan pengambilan kebijakan di tingkat lokal dan nasional.

2. Tinjauan Pustaka

Nama Penulis	Judul	Kesimpulan
1. Ika Widiastuti (2017)	Pelayanan badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) kesehatan di jawa barat	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
2. Solechan (2019)	Badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) kesehatan sebagai pelayanan publik	Badan Administrasi Jaminan Sosial adalah badan hukum untuk Melaksanakan program jaminan sosial untuk memastikan bahwa semua orang dapat memenuhi kebutuhan dasar kehidupan yang layak. BPJS diselenggarakan berdasarkan prinsip kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan tujuan mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak bagi setiap warga negara Indonesia telah menjadi hak asasi manusia. BPJS memiliki visi dan misi dalam di mana harus dilaksanakan, antara lain: Visi BPJS Kesehatan: "Cakupan Universal 2019" paling lambat 1 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional untuk mendapatkan manfaat pemeliharaan dan perlindungan Kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang andal, unggul dan andal.
3. ¹ Hasrillah ² Yaqub Cikusin	Implementasi pelayanan kesehatan masyarakat	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulan dapat ditarik berdasarkan pengamatan, wawancara dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian di lapangan, pelaksanaan Program BPJS di puskesmas

³ Hayat	melalui program bpjs kesehatan(studi pada puskesmas kedungkandang kota malang)	Kedungkandang masih belum optimal, masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) belum optimal, hal ini terlihat dari ukuran dan tujuan kebijakan, mengungkapkan bahwa dari penelitian lebih lanjut program lembaga penyelenggara jaminan kesehatan telah tercapai. Sumber dayanya cukup baik, tetapi sumber daya harus dioptimalkan lebih lanjut. Komunikasi antar organisasi dan pelaksanaan kegiatan, diperlukan sosialisasi yang lebih baik. Misalnya, dengan berkomunikasi lebih jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat tentang program BPJS.
--------------------	--	--

3. Metode Penelitian

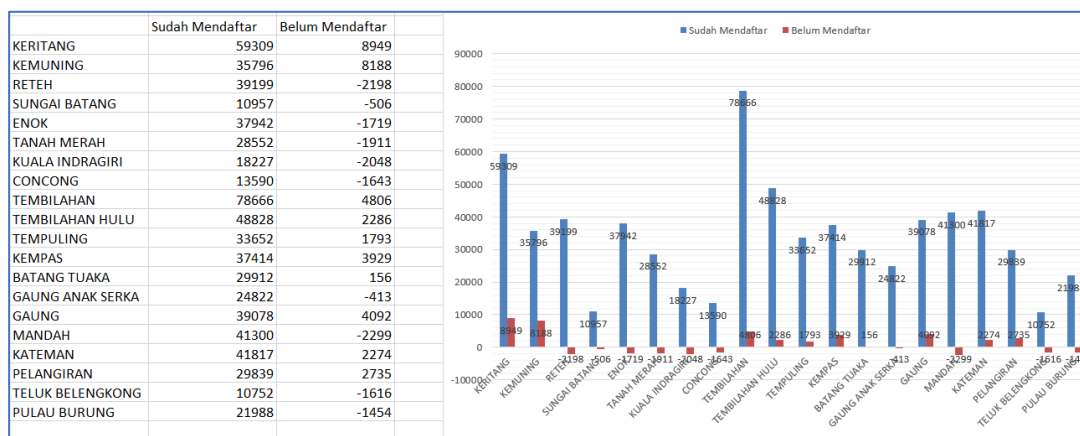
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis pola penggunaan layanan BPJS Kesehatan oleh masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan wilayah domisili. Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indragiri Hilir dan dokumen-dokumen pendukung dari instansi terkait seperti BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah peserta BPJS Kesehatan berdasarkan wilayah domisili.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri dan mengunduh data dari publikasi resmi BPS Kabupaten Indragiri Hilir. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan dan disusun berdasarkan kategori-kategori tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu dalam penggunaan layanan BPJS Kesehatan oleh masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan uraian naratif untuk memudahkan pemahaman terhadap kondisi yang terjadi di lapangan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran umum mengenai efektivitas pemanfaatan layanan BPJS Kesehatan berdasarkan data statistik yang tersedia.

4. Hasil Dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program BPJS Kesehatan telah dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir, serta menganalisis sebaran kepesertaan berdasarkan wilayah kecamatan. Data yang digunakan berasal dari sumber resmi BPS dan instansi terkait, dengan fokus pada jumlah penduduk yang telah terdaftar dan belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepesertaan BPJS di Kabupaten Indragiri Hilir sudah cukup tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat mulai menyadari pentingnya perlindungan kesehatan melalui skema jaminan sosial. Namun demikian, tingkat pemanfaatan dan pendaftaran masih menunjukkan variasi yang cukup tajam antar wilayah kecamatan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jumlah penduduk, tingkat akses terhadap fasilitas kesehatan, kesadaran masyarakat, serta kondisi geografis masing-masing wilayah. Beberapa kecamatan menunjukkan tingkat kepesertaan yang sangat tinggi, sedangkan kecamatan lainnya masih memiliki jumlah signifikan penduduk yang belum terdaftar. Bahkan dalam beberapa kasus, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah penduduk dan jumlah peserta yang tercatat, yang kemungkinan disebabkan oleh masalah administratif atau perbedaan data sumber.

Untuk memahami lebih lanjut kondisi di lapangan, berikut ini disajikan analisis per kecamatan terkait distribusi peserta dan non-peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Indragiri Hilir.



Gambar 1. non-peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan data yang divisualisasikan dalam grafik, terlihat adanya variasi signifikan antara jumlah penduduk yang sudah dan belum mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan di masing-masing kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Kecamatan Tembilahan menempati posisi tertinggi dengan jumlah peserta BPJS terbanyak, yakni 78.666 orang, diikuti oleh Kecamatan Keritang (59.309 orang) dan Kateman (41.817 orang). Hal ini mencerminkan bahwa wilayah-wilayah dengan konsentrasi penduduk lebih besar atau yang berada di kawasan perkotaan cenderung memiliki tingkat kepesertaan yang tinggi. Wilayah ini juga umumnya lebih dekat dengan fasilitas kesehatan yang memadai, sehingga mendorong masyarakat untuk mendaftar BPJS demi kemudahan akses layanan.

Sebaliknya, beberapa kecamatan seperti Sungai Batang (10.957), Teluk Belengkong (10.752), dan Pulau Burung (21.988) tercatat memiliki jumlah peserta BPJS yang relatif rendah. Rendahnya angka kepesertaan ini diduga terkait dengan kendala geografis dan akses transportasi, karena wilayah tersebut berada di daerah pesisir atau terluar yang sulit dijangkau. Hal ini diperkuat dengan data negatif pada kolom "Belum Mendaftar", yang mengindikasikan adanya kekeliruan pencatatan atau estimasi kependudukan yang belum terverifikasi.

Beberapa kecamatan seperti Kemuning, Keritang, Tembilahan Hulu, dan Gaung menunjukkan jumlah warga yang belum mendaftar cukup signifikan, yaitu masing-masing lebih dari 4.000 orang. Hal ini menandakan masih adanya kelompok masyarakat yang belum terakses atau belum memiliki kesadaran penuh terhadap pentingnya jaminan kesehatan. Di sisi lain, ada juga kecamatan yang menunjukkan data negatif dalam kategori "Belum Mendaftar", seperti Reth (-2.198) dan Enok (-1.719). Data ini mungkin menunjukkan adanya selisih atau kesalahan dalam estimasi jumlah penduduk, atau bisa juga diartikan bahwa jumlah peserta BPJS melebihi estimasi jumlah penduduk yang tercatat secara administratif.

Secara umum, grafik ini menunjukkan bahwa meskipun program BPJS Kesehatan telah menjangkau sebagian besar masyarakat Indragiri Hilir, namun masih terdapat kesenjangan distribusi kepesertaan antar kecamatan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam memastikan keadilan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah dengan kondisi geografis sulit dan infrastruktur terbatas.

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap data kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Indragiri Hilir, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam program jaminan kesehatan nasional sudah tergolong tinggi. Capaian ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kesehatan melalui program BPJS semakin meningkat. Beberapa kecamatan seperti Tembilahan, Keritang, dan Kateman mencatat angka kepesertaan yang cukup besar, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur, kedekatan dengan fasilitas kesehatan, serta jumlah penduduk yang lebih padat.

Meski demikian, masih terdapat ketimpangan antar wilayah, terutama di daerah-daerah pesisir dan terpencil seperti Sungai Batang, Teluk Belengkong, dan Pulau Burung, yang menunjukkan tingkat kepesertaan yang relatif rendah. Kondisi geografis yang menantang, keterbatasan akses transportasi, dan rendahnya pemahaman serta penyuluhan mengenai BPJS menjadi faktor utama yang menghambat peningkatan kepesertaan di wilayah-wilayah tersebut.

Selain itu, ditemukan pula adanya data yang tidak selaras, khususnya dalam kategori "Belum Mendaftar", pada beberapa kecamatan. Hal ini mengindikasikan kemungkinan adanya kesalahan dalam pencatatan atau perbedaan sumber data antara jumlah penduduk dan peserta BPJS. Situasi ini menegaskan pentingnya pembaruan dan verifikasi data secara rutin agar pelaksanaan program BPJS lebih tepat sasaran.

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih fleksibel dan menyeluruh untuk meningkatkan cakupan kepesertaan, terutama di daerah yang memiliki kendala geografis dan minim informasi tentang program. Penguatan kerja sama antar lembaga, pembenahan data, serta pendekatan yang melibatkan masyarakat secara langsung perlu ditingkatkan agar setiap warga, tanpa terkecuali, dapat mengakses layanan kesehatan secara adil dan merata.

Referensi

- [1] Anggriani, S. W. Kualitas pelayanan bagi peserta BPJS kesehatan dan non BPJS kesehatan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggaladewi*, 5(2), 101527. 2016
- [2] BAILANG, I. P. Tingkat Kepuasan Pasien Peserta Bpjs Kesehatan Terhadap Kualitas Pelayanan Di Puskesmas Bailang Kota Manado. 2019
- [3] Hasrillah, H., Cikusin, Y., & Hayat, H. Implementasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Melalui Program BPJS Kesehatan (Studi pada Puskesmas Kedungkandang Kota Malang). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2869-2882. 2021
- [4] Listiyana, I., & Rustiana, E. R. Analisis Kepuasan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pengguna Bpjs Kesehatan Di Kota Semarang. *Unnes Journal of Public Health*, 6(1), 53-58. 2017
- [5] Malik, A. A. Implementasi kebijakan diskresi pada pelayanan kesehatan badan penyelenggara jaminan kesehatan (bpjs). *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 8(1), 1-8.2019
- [6] Pertiwi, M., & Nurcahyanto, H. Efektivitas program BPJS kesehatan di kota Semarang (studi kasus pada pasien

- pengguna jasa BPJS kesehatan di puskesmas Srandol). *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2), 416-430. 2017
- [7] Purwadi, P., Ramadhan, P. S., & Safitri, N. . Penerapan Data Mining Untuk Mengestimasi Laju Pertumbuhan Penduduk Menggunakan Metode Regresi Linier Berganda Pada BPS Deli Serdang. *Jurnal SAINTIKOM (Jurnal Sains Manajemen Informatika Dan Komputer)*, 18(1), 55-61. 2019
- [8] Rumengan, D. S., Umboh, J. M. L., & Kandou, G. D. (2015). Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada peserta BPJS kesehatan di Puskesmas Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado. *Jikmu*, 5(2).
- [9] Rumengan, D. S., Umboh, J. M. L., & Kandou, G. D. . Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada peserta BPJS kesehatan di Puskesmas Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado. *Jikmu*, 5(2).2015
- [10] Solechan, S. (2019). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 686-696.
- [11] Widiastuti, I.. Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jawa Barat. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 91-101. 2017.